

ANALISIS WACANA PEMBERITAAN PADA TRIBUN KALTIM TENTANG POLEMIK SIDANG GUGATAN PENOLAKAN HASIL PEMILU PRESIDEN 2014 DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Muhammad Abdul Manaf¹

ABSTRAK

Analisis Wacana Pemberitaan Pada Tribun Kaltim Tentang Polemik Sidang Gugatan Penolakan Hasil Pemilu Presiden 2014 Di Mahkamah Konstitusi. Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa, dan menginterpretasi konstruksi makna dalam wacana pemberitaan pada Tribun Kaltim tentang polemik sidang gugatan penolakan hasil pemilu presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 6 Agustus 2014 hingga 23 Agustus 2014.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan, menganalisa, dan menginterpretasi mengenai wacana pemberitaan pada Tribun Kaltim tentang polemik sidang gugatan penolakan hasil pemilu presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian melalui klipng berita, wawancara, kepustakaan dan penelitian dokumentasi. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis wacana Teun van Dijk yang dibagi menjadi tiga struktur, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui bahwa analisis wacana pemberitaan tentang polemik sidang gugatan penolakan hasil pemilu presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi menjadi headline selama kurang lebih dua puluh hari dan termasuk hardnews di harian Tribun Kaltim. Dari segi analisis teks, isi pemberitaannya lebih membahas proses persidangan yang berlangsung di MK. Struktur bahasa dan pemilihan kata yang digunakan lebih sopan, halus, namun tegas seperti kata “nasihati”, “curahan hati” dan kata “kandas”. Pada segi kognisi sosial, penyajian beritanya berisi fakta empiris (fakta kebenaran dilapangan), fakta opini dari narasumber, serta tidak ada keterpihakan atau interfensi dari salah satu tokoh. Segi konteks sosial, situasi masyarakat Kota Samarinda dengan adanya pemberitaan ini menjadi berkubu, berpihak dan memunculkan sikap yang pro (mendukung) atau sikap kontra (tidak mendukung) pada salah satu pasangan calon Presiden.

Kata kunci : Analisis Wacana, Polemik, Pemilu Presiden, Tribun Kaltim.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: m_manaf72@yahoo.com

PENDAHULUAN

Tahun 2014 merupakan tahun yang sangat spesial, dimana pesta demokrasi yang memunculkan kebijakan serta pemimpin baru di negara ini dibentuk. Seluruh aspek lapisan masyarakat mulai kalangan bawah sampai kalangan atas, dari media cetak hingga media elektronik serta beberapa orang penting yang terlibat langsung di dalam pesta demokrasi ini ikut berperan aktif dalam mensukseskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Pilpres) untuk membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Pilpres 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014, sehingga dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019 dan diikuti oleh dua pasang calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres). Diantaranya adalah Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2009 hingga 2014. Kemudian, Joko Widodo mantan Wali Kota Surakarta (Solo) dan Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Jusuf Kalla mantan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun periode 2004 hingga 2009. Pilpres 2014 akhirnya dimenangkan oleh pasangan Jokowi-JK dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, dan pasangan Prabowo-Hatta yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014.

Gaung Pilpres 2014 memang belum sepenuhnya berakhir, meskipun keputusan KPU sudah final dan menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai pasangan terpilih Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2014. Namun nyatanya, persoalan masih berlanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan terjadi gugatan dari pihak Prabowo-Hatta atas hasil Pilpres 2014 hingga berakhir penolakan. Berita tentang penolakan MK terhadap gugatan dari kubu Prabowo-Hatta tidaklah luput dari sorotan media, baik media cetak maupun media elektronik. Dalam sebuah berita di media cetak sangatlah berkaitan erat dengan suatu bahasan wacana atau teks, terlebih untuk media cetak harian Tribun Kaltim. Tribun Kaltim yang mempunyai motto “Independen & Kredibel” juga memiliki peluang untuk memberikan perspektif pembaca terkait sidang gugatan hasil Pilpres 2014 di MK dengan ideologi yang dimiliki media cetak Tribun Kaltim, baik pendukung Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK khususnya yang berada di wilayah Kalimantan Timur.

Seperti halnya sajian wacana pada salah satu kalimat dalam berita *headline* Tribun Kaltim “Prabowo Minta Pemilu Ulang” dengan penekanan di bawah kalimat *headline news* “Selain itu Desak MK Diskualifikasi Presiden Terpilih Jokowi” dan “Anggap Penetapan Rekapitulasi Hasil Pilpres 2014 Tidak Sah” edisi 9 Agustus 2014. Kemudian “Gugatan Prabowo di MK Kandas” dengan judul *penjelas* “Semua Gugatan Ditolak tanpa Dissenting Opinion” dan “Bentrok dengan Polisi 46 Pendukung Prabowo Cedera” edisi 22 Agustus 2014. Surat kabar Tribun Kaltim juga menaruh perhatian lebih terhadap wacana pemberitaan tentang polemik sidang gugatan penolakan hasil pemilu presiden 2014 di

Mahkamah Konstitusi dan menjadikan berita tersebut sebagai berita *headline* hampir setiap hari selama 20 hari saat persidangan tersebut berlangsung. Dari beberapa hal ini lah maka peneliti tertarik untuk meneliti, mencermati dan menganalisa konstruksi wacana pemberitaan tentang polemik sidang gugatan penolakan hasil pemilu presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi pada harian Tribun Kaltim sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai 23 Agustus 2014.

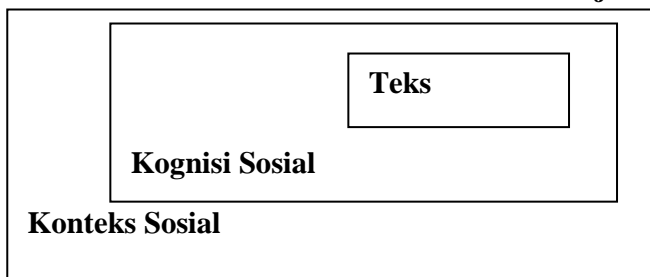
KERANGKA DASAR TEORI

Teori Analisis Wacana Teun A. Van Dijk

Analisis van Dijk di sini menghubungkan (analisis tekstual yang memusatkan perhatian hanya pada teks) ke arah analisis yang komprehensif bagaimana teks itu diproduksi, baik hubungannya dengan individu, wartawan maupun dari masyarakat (Eriyanto, 2012:224). Wacana oleh van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi, yaitu *teks*, bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. *Kognisi sosial*, proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. dan *konteks sosial*, wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah.

Analisis van Dijk disini menghubungkan analisis tekstual yang memusatkan perhatian melulu pada teks, kearah analisis komprehensif bagaimana teks berita itu diproduksi, baik dalam hubungannya dengan individu wartawan maupun dari masyarakat. Model van Dijk dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Model Analisis Teun A. Van Dijk



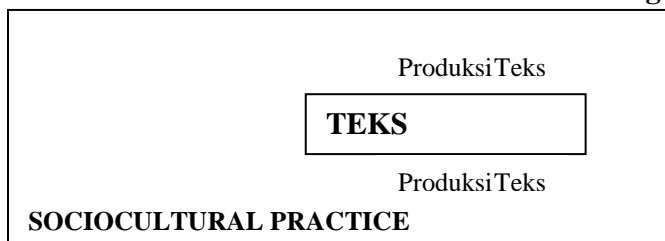
Sumber : Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKIS. 2012:225

Teori Norman Fairclough

Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi, yakni *teks*, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*. Fairclough juga membuat model yang mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana yang didasarkan pada linguistik, pemahaman sosial, politik, dan secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial. Oleh karena itu, model yang dikemukakan oleh Fairclough ini sering juga disebut model perubahan sosial (*social change*) (Eriyanto, 2012:285). Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi; *teks*, *discourse practice*,

dan *sociocultural practice*. Dalam model Fairclough, teks disini dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik dan tata kalimat.

Gambar 2.2. Model Analisis Norman Fairclough



Teori Politik

Miriam Budiarjo (2008) dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Politik* menyebutkan bahwa teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik sekaligus renungan atas; a). Tujuan dari kegiatan politik, b). Cara-cara mencapai tujuan itu, c). Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan d). Kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.

Menurut Thomas P. Jenkin dalam *The Study of Political Theory* yang dikutip dari buku Miriam Budiarjo (2012:56) dikatakan bahwa dapat dibedakan dua macam teori politik, sekalipun perbedaan kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak. Yaitu:

1. Teori-teori yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik (*norms for political behavior*).
2. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai.

Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam teori politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik dan lain sebagainya

Teori Representasi

Marcel Danies (2010:3-4) mendefinisikan representasi sebagai, proses perekaman gagasan, pengetahuan, atau pesan secara fisik. Secara lebih tepat dapat didefinisikan sebagai penggunaan 'tanda-tanda' (gambar, suara, dan sebaainya) untuk menampilkan ulang sesuatu yang diserap, diindra, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik. Di dalam semiotika dinyatakan bahwa bentuk fisik sebuah representasi, yaitu X, pada umumnya disebut sebagai *penanda*. Makna yang dibangkitkannya (baik itu jelas maupun tidak), yaitu Y, pada umumnya

dinamakan *petanda* dan makna secara potensial bisa diambil dari representasi ini ($X=Y$) dalam sebuah lingkungan budaya tertentu disebut sebagai signifikasi (sistem penandaan).

Pengertian Analisis Wacana

Teun A. van Dijk dalam Alexsobur (2006:48) mengemukakan bahwa analisis wacana digunakan untuk menganalisis wacana-wacana kritis, diantaranya politik, ras, gender, kelas sosial, hegemoni, dan lain-lain. Analisis wacana kritis adalah pendekatan yang menekankan peran aktif wacana dalam mengonstruksi perubahan di dunia sosial karena penggunaan bahasa konkret berdasarkan kesepakatan masyarakat yang mapan. Analisis wacana tidak lepas dari pemakaian kaidah berbagai cabang ilmu bahasa, seperti halnya semantik, sintaksis, dan sebagainya. Struktur wacana adalah cara yang efektif untuk melihat proses retorika dan persuasi yang dijalankan ketika seseorang menyampaikan pesan. Kata-kata tertentu mungkin dipilih untuk mempertegas pilihan dan sikap, membentuk kesadaran politik, dan sebagainya. Berikut diuraikan satu persatu elemen wacana van Dijk tersebut:

Gambar Elemen Wacana van Dijk

STRUKTUR WACANA	HAL YANG DIAMATI	ELEMEN
Struktur Makro	TEMATIK Tema/topik yang dikedepankan dalam suatu berita.	Topik
Superstruktur	SKEMATIK Bagaimana bagian dan urutan berita diskemakan dalam teks berita utuh.	Skema
Struktur Mikro	SEMANTIK Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. Misal dengan memberi detil pada satu sisi atau membuat eksplisit satu sisi dan mengurangi detil sisi lain.	Latar, Detil, Maksud, Pra anggapan, Nominalisasi
	SINTAKSIS Bagaimana kalimat (bentuk, susunan) yang dipilih.	Bentuk kalimat, koherensi, Kata Ganti
	STILISTIK Bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita.	Leksikon
	RETORIS Bagaimana dan dengan cara penekanan dilakukan.	Grafis, Metafora, Ekspresi

Pengertian Polemik

Polemik adalah perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka di media massa. Menurut Helga Nowotny dalam van Harskamp (2009:5) mengatakan bahwa kontroversi adalah bagian integral dari produksi pengetahuan secara kolektif; ketidaksepakatan mengenai konsep-konsep, metode-metode, interpretasi-interpretasi, dan aplikasi-aplikasi adalah tulang punggung sains serta merupakan salah satu faktor paling produktif dalam pengembangan ilmiah. Selain itu Helga Nowotny juga mengatakan bahwa ada persamaan kata antara polemik dengan kontroversi yang menjadi bagian dalam studi-studi kasus politik atau pun agama pada suatu negara yang di publikasikan oleh suatu media massa secara terus menerus (van Harskamp, 2009:6).

Mukthie (2013:127) dalam bukunya *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi* mengatakan bahwa polemik juga termasuk bagian dari perselisihan dalam konteks politik terlebih dalam permasalahan pemilihan umum. UUD 1945 tidak menegaskan tentang pengertian dan ruang lingkup mengenai apa yang dimaksud dengan “perselisihan hasil pemilihan umum” yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1), sehingga undang-undang lah yang kemudian mengaturnya, yakni UU MK, UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008.

Pengertian Komunikasi Massa

Liliweri dalam Marhaeni Fajar (2009:222) berpendapat bahwa komunikasi massa merupakan suatu proses yang melukiskan bagaimana komunikator secara profesional menggunakan teknologi membagi dalam menyebarkan pengalamannya yang melampaui jarak untuk mempengaruhi khalayak dalam jumlah yang banyak. Misalnya buku, pamphlet, majalah, surat kabar, warkat pos, rekaman-rekaman, televisi, gambar-gambar poster, bahkan saat ini ditambah dengan komputer serta aplikasi dengan jaringan telepon serta satelit.

Pengertian Berita

Berita (news) adalah laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian orang banyak (Suhandang 2010:103). Dalam penyajian berita dimedia massa cetak (surat kabar/majalah) memiliki ciri khas tersendiri, yaitu menggunakan jenis berita yang langsung mengemukakan fakta yang disebut *straight news* tanpa dibumbu-bumbuhi kata-kata diplomatis atau berita tidak langsung yang dibumbu-bumbuhi (diplomatis) sehingga fakta yang kelihatan sepele menjadi menarik untuk diminati dan dinikmati, dan jenis ini disebut *feature news* (Suhandang, 2010:104).

Berita (news) itu tiada lain adalah laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian orang banyak (Suhandang 2010:103). Dalam penyajian berita dimedia massa cetak (surat kabar/majalah) memiliki ciri khas tersendiri, yaitu menggunakan jenis berita yang langsung

mengemukakan fakta yang disebut *straight news* tanpa dibumbu-bumbuhi kata-kata diplomatis atau berita tidak langsung yang dibumbu-bumbuhi (diplomatis) sehingga fakta yang kelihatan sepele menjadi menarik untuk diminati dan dinikmati, dan jenis ini disebut *feature news* (Suhandang, 2010:104). Yusuf dalam buku *Jurnalistik Terapan* (2010:45) mengemukakan bahwa berita menjadi unsur terpenting di dalam sebuah media massa. Tidak ada aktivitas jurnalistik tanpa berita. Berita menempati 90% dari isi media massa baik media cetak, media elektronik, atau media *online* sekalipun.

Menurut Suhandang (2010:115-130) bahwa keseluruhan bangunan naskah berita (surat kabar) terdiri atas tiga unsur, yaitu: *Headline* (judul berita), *Lead* (teras berita), dan *Body* (kelengkapan atau penjelasan berita) :

1. *Headline*, merupakan intisari berita. Dibuat dalam satu atau dua kalimat pendek tapi cukup memberitahukan persoalan pokok peristiwa yang diberitakannya.
2. *Lead*, selaku sari dari beritanya, merupakan laporan singkat yang bersifat klimaks dari peristiwa yang dilaporkannya. Di dalam *Lead* ini muncullah unsur berita 5 W + 1 H yaitu *What* (Apa), *Who* (Siapa), *When* (Kapan), *Where* (Di mana), *Why* (Kenapa), dan *How* (Bagaimana).

Body, pada bagian ini kita jumpai keterangan rinci dan dapat melengkapi serta memperjelas fakta atau data yang disuguhkan.

Pengertian Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dalam suatu lembaga Negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan beranggotakan sembilan orang hakim konstitusi, yaitu tiga orang diajukan oleh MA, tiga orang diajukan oleh DPR dan tiga orang diajukan oleh Presiden. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan peran MK penting dalam mengharmoniskan hubungan antar lembaga negara yang sering berbenturan.

Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Pengertian Presiden dan Wakil Presiden

Presiden Indonesia (nama jabatan resmi Presiden Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala

pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Wakil Presiden Indonesia (nama jabatan resmi Wakil Presiden Republik Indonesia) adalah pembantu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia yang bersifat luar biasa dan istimewa. Sebagai pembantu kepala negara, Wakil Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia yang kualitas tindakannya sama dengan kualitas tindakan seorang presiden sebagai kepala negara. Wakil Presiden adalah pembantu presiden yang kualitas bantuannya di atas bantuan yang diberikan oleh Menteri, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari yang didelegasikan kepadanya. Wakil Presiden menjabat selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul di atas, maka jenis penelitian yang di gunakan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis wacana menggunakan model Teun A. van Dijk terkait pemberitaan pada Tribun Kaltim tentang polemik sidang gugatan penolakan hasil pemilu presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi. Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan, menganalisa, dan menginterpretasi apa yang dikonstruksi oleh harian Tribun Kaltim terhadap pemberitaan tentang polemik sidang gugatan penolakan hasil pemilu presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap pengumpulan data dan analisis serta pembahasan hasil penelitian ini, didasarkan pada tiga langkah yang telah dipaparkan van Dijk. Tiga langkah yang dimaksud adalah: (1) analisis tekstual berita pada Tribun Kaltim tentang polemik sidang gugatan penolakan hasil pemilu presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi. (2) Analisis kognisi sosial wartawan Tribun Kaltim, dan (3) Analisis konteks sosial dengan merujuk pada surat kabar harian Tribun Kaltim di Samarinda. Pada analisis tekstual berita harian Tribun Kaltim edisi 6 Agustus 2014 – 23 Agustus 2014 menjadi berita *headline* selama tiga pekan di halaman utama harian Tribun Kaltim dan ditemukan terdapat 13 berita yang menjadi objek kajian penelitian ini. Kajian penelitian pada berita di harian Tribun Kaltim tersebut akan dianalisis dan diinterpretasi dengan tiga struktur pada teks dalam model analisis Teun A. van Dijk yakni :

Struktur makro

Struktur makro merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat dipahami dengan melihat topik atau tema yang diangkat oleh harian Tribun Kaltim dalam pemberitaan tentang polemik sidang gugatan penolakan hasil

pemilu Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi, salah satunya pada judul utama pada *edisi 6 Agustus 2014* yang menjelaskan tentang hasil sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar pada tanggal 6 Agustus 2014, yakni hakim MK mendengarkan materi gugatan dari pihak Prabowo-Hatta kemudian hakim MK memberikan nasihat-nasihat dan masukan sebagai pertimbangan serta perbaikan dari permohonan gugatan yang diajukan pihak pemohon.

“MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan menasihati pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang digelar hari Rabu (6/8) ini, mulai pukul 09.30 WIB. Nasihat-nasihat itu akan disampaikan setelah pihak Prabowo-Hatta menjelaskan tentang materi gugatan yang mereka ajukan. (Sumber:Tribun Kaltim Edisi 6 Agustus 2014)”. Judul kedua pada *edisi 6 Agustus 2014*, menjelaskan tentang upaya pihak MK dalam mengerahkan sebanyak 125 tenaga ahli lintas bidang dari internal hakim MK untuk membantu menangani persidangan PHPU ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. “MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengerahkan 125 tenaga ahli lintas bidang untuk menangani persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014. Sekretaris Jenderal MK, Danedri M Gaffar, mengatakan 125 tenaga ahli tersebut semuanya dari internal MK dan tidak ada dari luar. Mereka adalah tenaga arsipasi (petugas arsip) penitera pengganti, transkriptor, perisalah transkriptor di komputer. (Sumber:Tribun Kaltim Edisi 6 Agustus 2014)“.

Superstruktur

Superstruktur merupakan kerangka suatu teks bagaimana struktur dan elemen wacana itu disusun dalam teks secara utuh. Seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan yang ada pada harian Tribun Kaltim mengenai pemberitaan tentang polemik sidang gugatan penolakan hasil pemilu presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 6 Agustus 2014 hingga tanggal 23 Agustus 2014. Skematik menunjukkan pada skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir, bentuk berita secara hipotetik mempunyai dua kategori skema besar yaitu pertama *summary* yang ditandai dengan dua elemen yaitu judul dan *lead*. Kemudian kedua, *story* yang mempunyai dua subkategori yakni pertama situasi yang mempunyai dua elemen episode dan latar, kemudian kedua adalah komentar yang mempunyai dua elemen reaksi atau komentar dan kesimpulan. Berdasarkan pemaparan diatas, maka skematik harian Tribun Kaltim dalam pemberitaan polemik sidang gugatan penolakan hasil pemilu Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya pada judul *edisi 22 Agustus 2014*.

Tanggal : 22 Agustus 2014

Judul : Gugatan Prabowo di MK Kandas

Semua Gugatan Ditolak tanpa Dissenting Opinion,

Bentrok dengan Polisi 46 Pendukung Prabowo Cedera

Prabowo Besuk Korban

Edisi Jumat 22 Agustus 2014 ini menjadi salah satu *headline news* serta topik utama di halaman pertama pada Tribun Kaltim yang heboh, dengan menggunakan *font* berukuran besar, terletak ditengah atas dan disertai visual yang jelas berkaitan dengan pemberitaan pada edisi ini. Judul utamanya adalah “Gugatan Prabowo di MK Kandas”, kalimat ini menjelaskan bahwa gugatan yang disampaikan oleh pihak Prabowo-Hatta terkait hasil Pilpres 2014 akhirnya harus kandas dan gagal di MK. Selain itu, peneliti dapat mengamati dari kata “kandas” yang berarti gagal atau terhenti ditengah jalan semua usaha yang dilakukan oleh Prabowo-Hatta untuk menggugat hasil Pilpres 2014 ke MK dan akhirnya harus kandas di MK.

Lead : “Jakarta, TRIBUN - Gugatan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akhir kandas di Mahkamah Konstitusi (MK). Majelis Hakim Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kubu Prabowo-Hatta. Putusan itu tanpa diwarnai dengan perbedaan pendapat hakim atau dissenting opinion. (Sumber: *Tribun Kaltim Edisi 22 Agustus 2014*)”. Judul *penjelas* tentang “Semua Gugatan Ditolak tanpa Dissenting Opinion” ini menjelaskan bahwa semua gugatan yang diajukan oleh pihak Prabowo-Hatta telah ditolak oleh MK tanpa adanya perdebatan pendapat atau *dissenting opinion*. Kata “ditolak” mengandung makna sebuah keputusan yang ditolak oleh MK terkait gugatan Prabowo-Hatta yang tanpa diwarnai dengan perdebatan pendapat kesembilan hakim MK atau *dissenting opinion*. Kata “tanpa” bermakna tanpa atau tidak dengan syarat apapun keputusan penolakan dari hakim MK terhadap gugatan Prabowo-Hatta.

Judul *penjelas* berikutnya yakni “Bentrok dengan Polisi 46 Pendukung Prabowo Cedera”, menjelaskan tentang adanya bentrokan antara para demonstran pendukung Prabowo-Hatta dengan Polisi yang menyebabkan para demonstran tersebut mengalami cedera dengan jumlah 46 orang. Kata “bentrok” berarti tindakan kekacauan yang menimbulkan bentrokan antara Polisi dengan para demonstran pendukung Prabowo-Hatta yang menyebabkan para demonstran tersebut mengalami cedera dengan jumlah mencapai 46 orang. Kemudian judul kedua adalah “Prabowo Besuk Korban” ini menjelaskan bahwa Prabowo membesuk atau menjenguk para korban bentrokan yang dirawat di rumah sakit. Kata “besuk” bermakna upaya untuk kunjungi atau menjenguk para korban cedera yang dirawat di rumah sakit akibat bentrok dengan Polisi.

Lead : “Puluhan massa pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengalami luka-luka ketika melakukan aksi unjuk rasa jelang pembacaan putusan gugatan hasil pilpres di MK. Luka-luka tersebut didapat saat terjadi kericuhan antara aparat kepolisian dan pendemo di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwoho, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. (Sumber: *Tribun Kaltim Edisi 22 Agustus 2014*)”.

Struktur mikro

Struktur mikro merupakan makna wacana yang dapat diamati dengan menganalisa kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, para frase, yang dipakai dalam

wacana secara utuh. Struktur mikro dalam wacana mencakup empat hal yaitu, pertama adalah semantik yang mempunyai elemen latar, detil, ilustrasi, dan maksud. Kedua adalah sintaksis yang mempunyai elemen koherensi, nominalisasi, abstraksi, bentuk kalimat, dan kata ganti. Ketiga adalah stilistik atau leksikon yang mempunyai elemen kata kunci, dan pemilihan kata (diksi). Keempat adalah retorik yang mempunyai elemen gaya, interaksi, ekspresi, metafora, dan *visual images*. Salah satunya ada pada judul *edisi 7 Agustus 2014* yaitu “*Curahan Hati Prabowo, Massa Kepung KPU Kaltim, Gugat Enam Tindakan*”.

Latar, Judul utama “Prabowo pun langsung menyampaikan curahan hati (curhat) dengan menyatakan banyak harapan pada persidangan. Ia mengaku yakin kebenaran akan muncul dalam sidang tersebut. Nasib bangsa Indonesia ada di sidang ini. Kita akan hormati dan sepakati kalau prosesnya benar dan jujur,” kata Prabowo. Kalimat ini terletak di latar sebagai penjelas dari isi pemberitaan pada edisi ini yang berkaitan dengan curahan hati seorang Prabowo. Judul kedua, “Riak-riak pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 masih terasa di Kaltim. Bersamaan dengan sidang pertama sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Peduli Pilpres 2014 berusaha mengepung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim di Samarinda, Rabu (6/8)”. Kalimat ini terletak di latar sebagai penjelas dari isi pemberitaan pada edisi ini yang berkaitan dengan massa dari Aliansi Masyarakat Kaltim Peduli Pilpres 2014 yang mengepung kantor KPU Kaltim. Judul ketiga, “Sidang perdana gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa telah digelar Rabu (6/8) kemarin di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat. Pada sidang perdana, majelis hakim MK mengagendakan pemeriksaan perkara”. Kalimat ini terletak di latar sebagai penjelas dari isi pemberitaan pada edisi ini yang berkaitan dengan sidang perdana yang mengagendakan pemeriksaan perkara oleh haki MK.

Kognisi Sosial

Isi pemberitaan yang disajikan oleh harian Tribun Kaltim pada edisi 6 Agustus 2014 hingga 23 Agustus 2014 tentang polemik sidang gugatan penolakan hasil pemilu presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi ini, dimaknai oleh wartawan Tribun Kaltim sebagai sebuah wacana berita yang besar, penting dan perlu untuk diberitakan kepada publik terutama masyarakat Kota Samarinda karena menyangkut tentang seorang tokoh politik besar, tinggi dan berpengaruh dalam transisi pemerintahan negara Indonesia yang nantinya akan menjadi pemimpin untuk negeri ini selama lima tahun kedepan. Adanya suatu gugatan yang diajukan oleh pihak Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap keputusan KPU yang menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang dalam Pilpres 2014 pada tanggal 21 Juli 2014 dalam rekapitulasi nasional yang lalu yakni dengan perolehan suara sebesar

70.997.833 suara atau 53,15% lebih unggul dari pasangan Prabowo-Hatta yang hanya memperoleh suara 62.576.444 suara atau 46,85% lebih sedikit dari pesaingnya tersebut, maka polemik ini lah yang mendasari wartawan Tribun Kaltim untuk mengangkat sejumlah judul *headline* sejak sidang perdana di buka hingga pembacaan putusan sidang terakhir ditetapkan. Dengan latar belakang ini lah maka muncul sebuah *historical situadness* (situasi sejarah) pada analisis kognisi sosial terhadap idiologi wartawan dengan memandang polemik ini menjadi suatu hak konstitusi bagi siapapun yang menjadi bagian dari negara demokrasi jika didalam hak kita sebagai warga negara merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil dimata hukum dan konstitusi negara maka hak kita boleh menggugat selama tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan, terlebih bagi pihak Prabowo-Hatta yang mana dinyatakan dalam gugatannya ada kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2014 sehingga muncul pemberitaan dengan judul “MK hanya Nasihati Prabowo” dengan judul *penjelas* “Sidang Perdana Perselisihan Hasil Pilpres 2014” *edisi 6 Agustus 2014*.

Pandangan wartawan dalam penyajian berita tentang polemik sidang gugatan Pilpres 2014 di MK ini juga tidak menjelaskan terkait adanya indikasi keterpihakan dari wartawan Tribun Kaltim kepada salah satu tokoh pada polemik pilpres 2014 ini. Dari hasil pemberitaan yang disajikan menggambarkan wartawan Tribun Kaltim sehingga judul yang disajikannya juga tidak menjelaskan adanya kata yang berpihak atau mendukung. Seperti pada judul utama *edisi 11 Agustus 2014* yaitu “Pemilih Prabowo tak Dukung Gugatan”, judul utama ini terlahir pada statemen atau ungkapan yang disampaikan langsung oleh badan riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada jumpa pers yang dilakukannya pada Minggu 10 Agustus 2014 lalu. Hal ini mengindikasikan bahwa munculnya judul pada *edisi 11 Agustus 2014* yang ditulis oleh wartawan Tribun Kaltim merupakan hasil berita yang bersifat fakta dilapangan dengan tidak ada penambahan kata atau kalimat yang seakan isinya dapat berpihak atau menjatuhkan kepada pihak Prabow-Hatta. Wartawan Tribun Kaltim juga mempunyai pandangan bahwa kondisi politik saat terjadinya polemik hasil Pilpres 2014 itu merupakan kondisi yang sah, lumrah dan hal yang diperbolehkan oleh undang-undang konstitusi yang terjadi pada negara demokrasi. Polemik yang terjadi pada hasil Pilpres 2014 tersebut sangatlah wajar dan tentunya memunculkan sikap *pro* (mendukung) ada pula yang *kontra* (tidak mendukung) untuk pasangan nomor satu dan pasangan nomor dua, sejauh semua pihak berlandas pada fakta yang sesungguhnya dalam hal ini adalah pelaksana pemilu atau KPU, Bawaslu, partai politik pengusung calon-calon Presiden maupun lembaga-lembaga negara lainnya yang menyelenggarakan Pilpres 2014 secara adil, jujur dan terbuka. Jika pasangan Jokowi-JK dinyatakan menang pada Pilpres 2014 maka semua pihak harus menerima hal itu, sejauh sudah diklarifikasi, tidak ada manipulasi, tidak ada penipuan, dan tidak ada *many politic*. Kemudian jika pasangan Prabowo-Hatta tidak menerima hal tersebut, maka hal itu merupakan suatu tindakan yang wajar dan positif, tetapi jika faktanya menyatakan bahwa

pasangan Jokowi-JK yang menang, maka yang lain dalam hal ini adalah pasangan Prabowo-Hatta hanya sebatas polemik seperti menyatakan aku tidak setuju, kami keberatan, dan kami menggugat keputusan. Lalu hasil putusan sidang oleh Ketua MK tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan kuat yaitu di Mahkamah Konstitusi (MK), kita sebagai pendukung yang *pro* maupun yang *kontra* harus menghargai keputusan terakhir di MK tersebut bahwa pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang pada Pilpres 2014 dan bagi pendukung maupun pasangan Prabowo-Hatta harus menerima bahwa pihaknya kalah dan MK telah menolak seluruh gugatan yang diajukannya tersebut.

Konteks Sosial

Pada konteks sosial, peneliti menganalisis bagaimana wacana berita tentang polemik gugatan hasil pilpres 2014 antara Prabowo-Hatta, Jokowi-JK dan pihak KPU hingga muncul polemik sidang gugatan penolakan hasil pemilu presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi ini diproduksi dan berkembang dalam masyarakat khususnya pada masyarakat Kota Samarinda Kalimantan Timur. Pada saat penerbitan berita tersebut, masyarakat di Kota Samarinda dan umumnya di wilayah Kalimantan Timur telah memunculkan masyarakat yang berpihak-pihak, berkubu-kubu dan kelompok-kelompok. Ada yang berpihak kepada kubu Prabowo-Hatta dan tidak sedikit pula yang berpihak dengan kubu Jokowi-JK, hal ini terlihat dari situasi masyarakat Kota Samarinda yang menunjukkan sikap *pro* (mendukung) dan *kontra* (tidak mendukung) pada salah satu pasangan calon Presiden pada Pilpres 2014 ini.

Munculnya judul “Massa Kepung KPU Kaltim” di *edisi 7 Agustus 2014* ini menunjukkan respon masyarakat yang aktif untuk membela salah satu pasangan calon Presiden dalam hal ini adalah pihak Prabowo-Hatta yang didukung sehingga muncul massa pendukung Prabowo-Hatta di Kaltim yang sedang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Kaltim. Mereka memunculkan sikap yang *pro* (membela) kepada Prabowo-Hatta yang sedang melakukan gugatan pada hasil Pilpres yang dinilai penuh kecurangan sehingga mereka perlu menunjukkan aksi demonstrasi untuk mendukung secara moral kepada pihak Prabowo-Hatta. Selain itu ada pula kondisi masyarakat yang pasif dan merasa tindakan gugatan yang dilakukan oleh Prabowo-Hatta hanyalah tindakan sia-sia belaka seperti pada judul utama di *edisi 11 Agustus 2014* “Pemilih Prabowo tak Dukung Gugatan”, pada judul ini dapat diketahui bahwa masyarakat saat itu memang tidak mendukung secara keseluruhan tindakan yang telah dilakukan oleh Prabowo-Hatta. Mereka menilai tindakan Prabowo-Hatta hanya lah tindakan yang sia-sia, justru menilai menilai tindakan gugatan atas kecurangan pada pilpres 2014 itu tidak lah benar mereka menganggap bahwa pelaksanaan pilpres 2014 berjalan dengan bebas dan jujur tanpa ada kecurangan seperti yang digugat oleh pihak Prabowo-Hatta dalam riset yang disampaikan oleh SMRC pada jumpa pers Minggu 10 Agustus 2014 lalu.

Selain itu, ada pula masyarakat yang bersikap *pro* kepada kubu Jokowi-JK karena masyarakat menilai keputusan KPU sebelum adanya gugatan tersebut adalah benar dan sesuai hasil suara yang sah. Seperti tersajikan pada judul utama di *edisi 10 Agustus 2014* yakni “Libur, Tim Jokowi Tetap Kerja”. Judul ini dapat menggambarkan betapa semangatnya para pihak Jokowi terutama masyarakat yang *pro* terhadap Jokowi-JK terkait tindakan yang dilakukannya tersebut yang mengartikan bahwa pihak Jokowi-JK tidak patah semangat dalam menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh pihak Prabowo-Hatta kepada pihaknya, mereka seakan mendukung penuh seluruh tindakan yang akan disiapkan dalam persidangan gugatan di MK. Sikap *pro* (mendukung) dan *kontra* (tidak mendukung) ini lah yang muncul pada masyarakat terutama masyarakat yang berada di Kota Samarinda Kalimantan Timur. Mereka seakan bersaing untuk memilih pasangan calon Presiden yang mempunyai hasil baik pada Pilpres 2014 dan loyalitas mereka kepada publik, masyarakat atau publik bahkan melakukan tindakan yang berpihak-pihak kepada masyarakat lain yang mendukung atau tidak mendukung calon pasangan Prabowo-Hatta dan calon pasangan Jokowi-JK. Sehingga tindakan semacam ini selalu muncul di masyarakat Kota Samarinda yang kompleks selama sidang gugatan hasil Pilpres 2014 di MK berlangsung.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui bahwa analisis wacana pemberitaan tentang polemik sidang gugatan penolakan hasil pemilu presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi menjadi berita *headline* selama kurang lebih dua puluh hari dan termasuk *hardnews* di harian Tribun Kaltim. Dari analisis teks peneliti menemukan bahwa pemberitaan tentang polemik sidang gugatan penolakan hasil Pilpres 2014 lebih berisi tentang proses dan langkah-langkah saat persidangan di MK. Bahasa yang digunakan tergolong wajar, dan jika dianalisis dari struktur bahasanya Tribun Kaltim lebih cenderung menggunakan bahasa dan pemilihan kata yang sopan, halus, namun tegas, seperti kata “nasihati”, “curahan hati” dan kata “kandas”. Dari segi analisis kognisi sosial pada wartawan harian Tribun Kaltim, peneliti menganalisis dari segi *historical situadness* (situasi sejarah) untuk mengetahui latar belakang berita yang telah dipaparkan. Sehingga dapat peneliti ketahui bahwa wartawan Tribun Kaltim dalam menyajikan pemberitaannya lebih berisi kepada fakta empiris, fakta opini, serta tidak ada keterpihakan atau interfensi dari salah satu tokoh. Dari segi analisis konteks sosial, peneliti dapat menggambarkan bahwa situasi masyarakat Kota Samarinda dengan adanya pemberitaan ini menjadi berkubu, berpihak dan memunculkan sikap yang *pro* (mendukung) atau sikap *kontra* (tidak mendukung) pada salah satu pasangan calon presiden yang telah diberitakan pada setiap judul utamanya.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan kepada publik atau pembaca agar mampu memilih dan memilah wacana pemberitaan yang akurat, fakta dan berimbang sesuai kebutuhan informasi yang diinginkan. Kemudian, diharapkan

pula agar pembaca mempunyai wawasan yang luas terkait wacana pemberitaan yang dimuat dalam surat kabar (koran) agar dapat menyaring mana berita yang benar dan mana berita salah, sehingga pembaca dapat memperoleh informasi yang sesuai kebutuhan dan informasi yang sesuai fakta, akurat dan berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiarjo, Miriam. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* edisi revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Danesi, Marcel. 2011. *Pesan, Tanda, dan Makna: Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Effendy, Onong Uchjana. 2009. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto, 2012. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fajar, Marhaeni. 2009. *Ilmu Komunikasi Teori & Praktik Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadi, Nurudin. 2007. *Wewenang Mahkamah Konstitusi, Pelaksana Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu*. (Cetakan Pertama). Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Kriyantono, Rachmad. 2010. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Manik, Husni Kamil. 2014. *Data pilpres 2014* <http://www.ku.go.id/> (diakses 12 Mei 2015).
- Nurudin, 2011. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sanit, Arbit. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan* edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sobur, Alex. 2012. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suhandang, Kustadi. 2005. *Periklanan: Manajemen, Kiat dan Strategi*. Bandung: Nuansa.
- Wibowo, Indiawan Seto Wahyu. 2010. *Semiotika Komunikasi Aplikasi Praktis Bagi Penelitian dan Skripsi Komunikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yoce Aliah Darma. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.
- Fajar, Prof. A. Mukthie. 2013. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Jatim: Setara Press.